

Peran Litbang dalam Pengambilan Kebijakan Strategis dan Pemecahan Masalah di Kota Bandung

Novie Indrawati Sagita¹, Selvi Centia², Agus Taryana³, Nurul Asiah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Padjadjaran, Jalan Ir Soekarno KM 21 Jatinangor-Sumedang

e-mail: selvi.centia@unpad.ac.id

Abstrak

Riset ini didasari sentralnya peran Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam mengakselerasi pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang mana litbang berperan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Bandung memerlukan badan penelitian dan pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan kompleks dan multidimensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerahnya. Berkontradiktif dengan itu, badan Litbang Kota Bandung masih dianggap belum optimal menjadi solusi pemecahan permasalahan Kota Bandung. Tujuan riset ini mendorong terciptanya penguatan bagi badan Litbang, khususnya akselerasi output penelitian litbang dalam merumuskan strategi kebijakan dan prioritas utama program Kota Bandung secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Dalam riset ini metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, Focussed Group Discussion (FGD), dan studi literatur. Sedangkan analisis menggunakan pendekatan analisa kebijakan dan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa Litbang Kota Bandung mengalami kendala dalam menemukan inovasi, menciptakan inovasi, mengembangkan potensi pendayagunaannya, dan menumbuhkan kemajuan IPTEK. Kendala tersebut diantaranya Program riset belum didasarkan pada permintaan dan kebutuhan pengguna, kurangnya tindak lanjut terhadap produk riset Litbang, kurangnya produk Litbang yang inovatif dan berdaya saing, terbatasnya SDM & anggaran, perlunya penguatan komitmen, dan kurangnya publikasi hasil Litbang. Sehingga diperlukan adanya penataan pengorganisasian dan mekanisme kerja organisasi Litbang, akselerasi kapasitas sumberdaya Litbang, Penyusunan RIPP yang sinergis dan berkesinambungan, penyusunan dan penerapan SOP keLitbangan, dorongan intensitas Publikasi ilmiah keLitbangan, serta mendorong kerjasama yang destruktif untuk penguatan kapasitas kelembagaan Litbang Kota Bandung.

Kata Kunci: Litbang, Optimalisasi, Organisasi, Peran.

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah dan kinerja administrasi. Salah satu tantangan strategis penelitian dan pengembangan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan berdasarkan eksplorasi dan analisis data ilmiah. Keberadaan penelitian dan pengembangan sangat penting dalam menunjang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002, Sistem Nasional (SINa) merupakan salah satu unsur penting dalam Lembaga penelitian dan pengembangan . Misinya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar berdasarkan karakteristiknya: industri, masyarakat, dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan berbagai

sektor (serta perekonomian, pendidikan, pertahanan, social dan budaya), sehingga penelitian dan pengembangan dapat menjadi kunci dan kekuatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing negara baik dalam lingkungan regional maupun global. Dengan berlakunya undang-undang ini, di lembaga litbang semakin dikembangkan oleh pemerintah nasional dan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 219 menyatakan bahwa litbang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu badan. Pada Pasal 388 UU yang sama juga dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangannya yaitu mengelola unsur manajemen yang diantaranya meliputi fungsi penelitian dan pengembangan. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 (berserta PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Berdasarkan perda tersebut, Mulai tahun 2017, Bappeda Kota Bandung menjadi Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan (Bappelitbang). Apabila bidang penelitian dan pengembangan mempunyai 3 (tiga) subbidang yaitu I subsektor sosial dan administrasi, II subsector ekonomi dan pembangunan, dan III subsektor inovasi dan teknologi. Dengan munculnya nomenklatur penelitian dan pengembangan di Bappelitbang serta bertambahnya tugas penelitian dan pengembangan dari tingkat subbagian hingga tingkat lapangan, maka peran penelitian dan pengembangan menjadi semakin strategis. Kegiatan penelitian dan pengembangan hendaknya mampu memberikan solusi penyelesaian permasalahan Kota Bandung, yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada. Luaran kegiatan litbang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi politik dan prioritas program utama Kota Bandung secara cermat, terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian, posisi litbang dalam sistem pembangunan daerah, pada umumnya masih menghadapi kendala, diantaranya:

- Sumber daya penelitian yang belum termanfaatkan secara optimal;
- Selama ini penelitian yang dilakukan masih bersifat parsial serta belum terfokus pada isu-isu strategis dan pemecahan masalah pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD);
- Rendahnya pemanfaatan dan tindaklanjut hasil penelitian;
- Belum adanya pedoman terkait arah penelitian dan penentuan prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan; serta
- Belum adanya standardisasi dan prosedur baik dalam pelaksanaan, koordinasi maupun kerjasama dengan *stakeholder* terkait kegiatan kelitbang.

Kondisi ini mendorong Bappelitbang Kota Bandung (khususnya Bidang Litbang) perlu merumuskan reorientasi kebijakan tentang pedoman penelitian dan pengembangan maupun prioritas program penelitian serta perumusan strategi.

Dalam penelitian ini menggunakan basis peningkatan kapasitas litbang yang di kemukakan oleh (Lakitan, 2010). Dalam meningkatkan kapasitas litbang dapat dilakukan dengan menempuh langkah – langkah penting berikut, yakni:

- Merumuskan kembali tujuan dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai;
- Melakukan reformasi struktural agar organisasi lembaga litbang dapat menjadi kendaraan yang efektif untuk mencapai tujuan;

- mengubah mindset dan budaya kerja komunitas litbang;
- Merubah paradigma riset yang semula hanya untuk pemuasan hasrat akademik semata, atau bersifat academic exercise, dengan mendahulukan prioritas kegiatan riset yang berorientasi pada untuk menghasilkan iptek yang sesuai kebutuhan dan bermanfaat secara nyata; serta
- Meningkatkan kapasitas pengembangan teknologi, lembaga litbang perlu mengembangkan kapasitas serapnya (*'absorptive capacity'*).

METODE

Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik hasil pengamatan maupun informasi dari subjek penelitian (informan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data lembaga yang sudah diolah maupun data publikasi yang disediakan institusi maupun media massa.

Teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian, adalah sebagai berikut :

- Wawancara yakni menanyakan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian yang berada pada bidang litbang Bappelitbang Kota Bandung.
- *Focussed Group Discussion* yakni melakukan diskusi secara terfokus dan mendalam dengan para pakar dan *stakeholder* yang berhubungan dengan kegiatan kelitbangan.
- Studi Literatur; mempelajari bahan bacaan dari berbagai macam sumber mengenai konsep-konsep yang ada kaitannya dengan kegiatan kelitbangan pemerintah daerah, seperti peran, tugas dan fungsi kelitbangan, pengembangan kapasitas, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan, koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan kelitbangan; Mempelajari perauran Perundangan-undangan serta berbagai dokumen resmi milik pemerintah lainnya; Melakukan telaah artikel yang dipublikasikan dan berbagai sumber lainnya seperti dokumen yang tidak dipublikasikan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni penelitian analisa kebijakan dan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kebijakan terfokus pada telaah bahan-bahan peraturan tertulis secara selektif. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi obyek penelitian dalam seting natural untuk memperoleh temuan-temuan penelitian yang ada serta yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yakni bagaimana landasan kebijakan lingkup Kota Bandung mengenai Rencana Induk Kelitbangan, Pedoman Pengusulan dan Pemanfaatan hasil Kegiatan Kelitbangan; serta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penyusunan kegiatan Kelitbangan yang perlu disusun, serta strategi apa yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelitbangan dan Kerjasama kelitbangan.

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu : melakukan coding, seleksi data, reduksi data dan penarikan Kesimpulan. Prosedur analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. kegiatan litbang dan pengembangan kemampuan litbang, serta arah peraturan perundang- undangan yang mengatur kegiatan litbang kota daerah. Analisis induktif mengacu pada fakta empiris melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Gambaran kondisi saat ini dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, diuraikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan dan mekanisme operasional Lembaga litbang, berdasarkan aspek aspek berikut: struktur organisasi, yurisdiksi dan manajemen,

koordinasi antarlembaga, kapasitas ekonomi regional, dan isu-isu terkait litbang di bidang tersebut kota Bandung. Kedua, kondisi sumber daya litbang yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan jaringan litbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa litbang Kota Bandung mengalami kendala dalam menemukan invensi, menciptakan inovasi, mengembangkan potensi pelayagunaannya, dan menumbuhkan kemajuan IPTEK yang dapat memberikan dukungan kinerja terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung. Kendala tersebut, sebagai berikut :

- Program riset yang dilakukan oleh litbang belum semuanya didasarkan pada permintaan dan kebutuhan pengguna (perangkat daerah yang berkepentingan);
- Litbang kurang menindaklanjuti melalui pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan produk riset litbang yang telah didayagunakan. Hal ini dapat menjatuhkan kredibilitas dan menurunkan tingkat kepercayaan perangkat daerah terhadap litbang;
- Produk litbang kurang mampu melakukan inovasi dan produk yang inovatif dan berdaya saing;
- Kondisi sumber daya litbang yang sangat terbatas, yakni SDM peneliti/perekayasa sebagai unsur utama pelaksana kegiatan kelitbangan dan SDM yang melakukan tugas penunjang kegiatan litbang, terbatasnya anggaran untuk membiayai kegiatan litbang, dan sarana dan prasarana seperti peralatan teknologi, perpustakaan, jaringan internet, laboratorium, dan sarana prasarana penunjang lainnya;
- Tenaga ahli dari unsur akademisi dan perguruan tinggi mendominasi kegiatan penelitian dalam institusi litbang Kota Bandung;
- Masalah anggaran/dana penelitian yang tidak memungkinkan litbang melakukan kegiatan penelitian yang berkelanjutan guna memenuhi rangkaian ilmiah kegiatan litbang, sehingga membatasi kesiapan dalam penyerapan dan penguasaan teknologi serta kemampuan berinovasi;
- Waktu sangat terbatas yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan litbang, menyulitkan penelitian yang bersifat invensi, pengembangan dan penerapan teknologi;
- Penelitian yang dilakukan litbang belum berorientasi pada bisnis sehingga kurang memiliki nilai komersial;
- Aspek pengorganisasian dan manajemen kegiatan kelitbangan belum optimal;
- Masih rendahnya komitmen pemimpin dalam pelayagunaan hasil litbang dalam membantu kelancaran program perangkat daerah maupun menjadi acuan/pertimbangan rekomendasi kebijakan;
- Kurangnya publikasi terhadap hasil-hasil litbang.

B. Pembahasan

Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan litbang, adalah sebagai berikut :

- Menata kembali aspek pengorganisasian dan mekanisme kerja organisasi litbang, yang diawali pembentukan MP dan TPM secara legal formal;

- Peningkatan sumber daya litbang, diantaranya peningkatan kapasitas SDM litbang, pembiayaan, dan sarana prasarana;
- Penyusunan RIPP yang menggambarkan rangkaian kegiatan ilmiah kelitbang secara sinergis dan berkesinambungan;
- Penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur kegiatan kelitbang;
- Meningkatkan intensitas publikasi karya ilmiah hasil kegiatan kelitbang;
- Merumuskan pola kerjasama yang dapat mendukung penguatan kapasitas kelembagaan litbang Kota Bandung.

a. Penataan Mekanisme Kerja dan Pengorganisasian Litbang Kota Bandung

Litbang Kota Bandung, perlu segera menginisiasi pembentukan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu secara legal formal. Legalitas pengorganisasian tersebut akan menjamin kejelasan mekanisme kegiatan litbang. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, mekanisme kegiatan kelitbang suatu rangkaian sub kegiatan, yang mana keluaran dari sub kegiatan terdahulu yang menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub penelitian dalam kegiatan litbang dapat digambarkan pada bagan alir sebagai berikut :

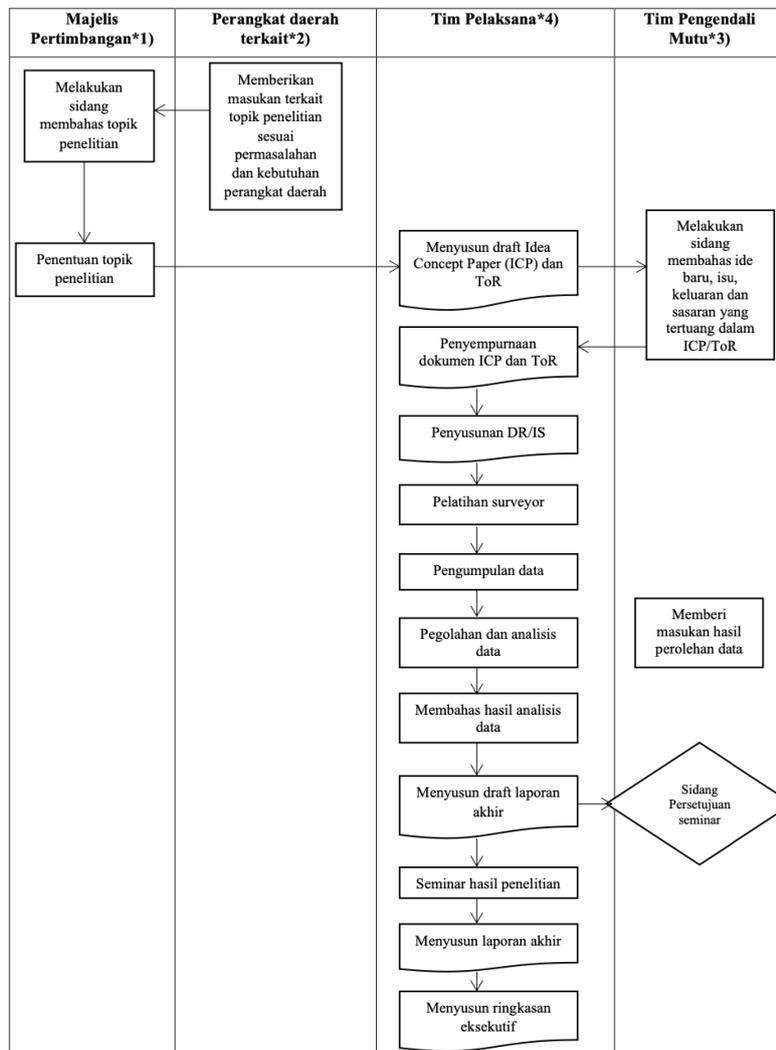


Diagram 1 Mekanisme Kegiatan Kelitbang
(Sumber : Permendagri no 17 tahun 2016)

Catatan

MP*1) = Walikota, Sekretariat Daerah, Kepala Bappelitbang, Kabid Litbang, Akademisi/Pakar

PD*2) = Perangkat daerah

Tim Pengendali Mutu*3) = Kabid Litbang, Kasubbid Litbang, Pejabat Pengawas, Akademisi/Pakar/Tenaga ahli

Tim Pelaksana*4) = Pejabat fungsional peneliti/perekayasa, Akademisi/Pakar/Tenaga ahli

Laporan akhir penelitian yang sudah disetujui dan diseminarkan disokumentasikan dalam perpustakaan litbang dan dituangkan dalam naskah jurnal ilmiah.

b. Peningkatan Sumber Daya Litbang Kota Bandung

Peningkatan SDM Litbang, sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, menghendaki ketersediaan SDM bagi lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan, terdiri atas :

- a) Peneliti, terdiri dari Pejabat Fungsional Peneliti dan perekayasa (yang tidak merangkap melaksanakan tugas dan jabatan mengerjakan urusan administrasi dan manajerial);
- b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi, yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c) Pegawai lain, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pada jabatan struktural;

Peningkatan SDM Litbang dilakukan guna mengurangi bantuan teknis dan tenaga ahli dari perguruan tinggi/akademi/peneliti luar negeri, dan dapat meningkatkan proporsi keterlibatan peneliti litbang daripada keterlibatan bantuan teknis atau tenaga ahli dalam dan luar negeri. Optimalisasi SDM Litbang juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, Bimtek, serta beasiswa pendidikan.

Sumber daya litbang yang perlu ditingkatkan bukan hanya SDM litbang saja, melainkan fasilitas komputer, internet, dan perpustakaan agar peneliti litbang dapat bekerja secara optimal, melakukan perbandingan, penemuan, melakukan modifikasi ataupun pengembangan sehingga menghasilkan suatu produk litbang yang bernilai tinggi.

c. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Kota Bandung

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Kegiatan kelitbangan dilakukan melalui tahapan:

a. Perencanaan

Tahapan perencanaan mencakup penyiapan dokumen Rencana program penelitian dan pengembangan yang disusun secara sistematis dan terukur sesuai dengan semua kelompok kepentingan. Tujuan penyusunan rencana kerja litbang adalah untuk melihat berbagai isu dan topik terkini terkait tugas dan tugas masing masing pemangku kepentingan, untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan dan pemilihan program prioritas litbang, kemudian diarahkan kedalam topik-topik kelitbangan. Mekanisme penyusunan rencana program kerja litbang dimulai dengan memetakan permasalahan yang ada saat ini dan permasalahan yang dilaksanakan secara internal, mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan yang dapat dilakukan dengan menggunakan formulir melingkar, dan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan. Hasil penyusunan program kerja litbang disampaikan kepada TKPMP untuk dibahas sehubungan dengan penyusunan rancangan prioritas kebijakan litbang.

Selanjutnyarancangan tersebut diserahkan kepada MP (Majelis Pertimbangan) untuk ditinjau dan disetujui, sehingga dapat ditetapkan sebagai program kerja penelitian dan pengembangan. Program litbang yang disetujui MP akan disinergikan dan dipadukan ke dalam dokumen Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (Bappelitbang). Dalam perspektif juridis formal, karena Litbang Kota Bandung sebagai salah satu bidang yang ada di Bappelitbang Kota Bandung, maka rencana program kerja kelitbangan secara tahunan dituangkan dalam Renja Bappelitbang, sedangkan aspek pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbang Kota Bandung, yang mana sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara khusus, dokumen perencanaan kegiatan kelitbangan dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) kota Bandung. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Rencana induk Kelitbangan merupakan dokumen kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan dokumen orientasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang memuat strategi langkah demi langkah dan arahan rinci program penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Tujuan umum rencana penelitian dan pengembangan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra dan RPJMD) agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan program penelitian dan pengembangan. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan dilakukan dengan menjaring permasalahan didasarkan permintaan dan kebutuhan pengguna (perangkat daerah) dan menjadi bahan penyusunan Idea Concept Proposal dan roadmap agenda penelitian, yang memiliki pandangan ke depan, mampu mengantisipasi perubahan, dan memenuhi harapan dalam menghadapi peluang dan tantangan.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota. Pelaksanaan Rencana induk kelitbangan harus selalu dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program, serta menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Penelitian dan pelaksanaan pengembangan meliputi penelitian kebijakan, pengembangan, evaluasi, perancangan, penerapan, pemanfaatan dan evaluasi, yang merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai-nilai dan konteks keilmuan baru atau cara baru. sehubungan dengan administrasi di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Terdapat berbagai jenis dan keluaran dari kegiatan kelitbangan, yaitu:

Tabel 1 Jenis dan Keluaran Kegiatan Kelitbangan

No	Jenis Kelitbangan	Keluaran
1	Penelitian	Rekomendasi
2	Pengkajian	
	A. Strategis	
	B. Aktual	
	C. Kompetitif	
3	Pengembangan	Naskah akademis dan rancangan regulasi Pemodelan kebijakan/program
4	Perekayasaan	Pedoman umum/ teknis pelaksanaan model kebijakan/ program
5	Penerapan	Uji coba model kebijakan/program pada daerah percontohan
6	Pengoperasian	Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi → lanjut dengan perbaikan → Dicabut/diberhentikan

(Sumber: Permendagri no 17 tahun 2016)

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program penelitian dan pengembangan merupakan dua tugas yang berbeda, namun kegiatannya sangat berkaitan. “Tindak lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi sejalan dengan rencana dan masalah dapat terdeteksi pada waktu yang tepat. Pemantauan memberikan informasi penting untuk menanggapi permasalahan, sedangkan evaluasi memposisikan informasi sehingga dapat digunakan dan menciptakan nilai. Evaluasi merupakan kajian terhadap kejadian, pemberian solusi, rekomendasi dan saran perbaikan, sehingga *monitoring* dan evaluasi harus berjalan beriringan” (Litbang, 2024).

Maksud pemantauan adalah untuk memastikan pelaksanaan program kerja penelitian dan pengembangan telah memenuhi sasaran dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara memantau kemajuan pelaksanaan program kerja penelitian dan pengembangan, mengidentifikasi dan mencegah permasalahan yang timbul dan/atau yang akan datang. melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Pemantauan terhadap program kerja litbang dilakukan pada setiap kegiatan litbang selama 3 (tiga) bulan (triwulan), setiap 6 bulan (semester), pada akhir tahun atau bila diperlukan.

d. Pelaporan.

Pelaporan program kerja kelitbangan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap aktivitas kelitbangan. “Pelaporan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis yang memberikan nilai tambah bagi lembaga penelitian dan pengembangan serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai proses pengambilan keputusan secara cepat, akurat dan tepat. Program kerja penelitian dan pengembangan dilaporkan secara berkala dan bertahap. Dalam konteks ini pelaporan yang dilakukan secara berkala adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semester) atau 1 (satu) tahun (tahunan) sesuai dengan tahapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Penerapan pelaporan dilakukan secara bertahap mulai dari unit kerja penelitian dan pengembangan terendah dalam organisasi hingga pimpinan puncak organisasi, misalnya dari manajer operasi atau manajer program hingga manajer program kepada pimpinan kementerian/lembaga. Datar juga berarti pelaporan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pelaporan litbang Kota Bandung ditujukan ke provinsi kemudian diteruskan ke pemerintah

pusat". (Litbang, 2024)

d. Pendayagunaan Hasil Kelitbangan

Salah satu tugas seluruh penelitian dan pengembangan adalah menghasilkan sebanyak mungkin inovasi, yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok kepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu pemanfaatan hasil kegiatan litbang harus diawasi oleh lembaga litbang agar tidak menyimpang dari gagasan awal. Oleh karena itu, pendampingan lembaga penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan (*user*) sangatlah penting. Pendampingan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai interaksi yang terus menerus terjadi antara kegiatan penelitian dan pengembangan Kota Bandung dengan perangkat daerah hingga terjadi perubahan kreatif dalam pengambilan kebijakan yang digagas oleh komponen atau perangkat daerah tersebut.

Pendayagunaan hasil kelitbangan oleh komponen dan perangkat daerah, menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu: inisiasi, internalisasi, institusionalisasi, dan keberlanjutan. Hubungan keempat tahap tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan Pendayagunaan Hasil Kelitbangan

(Sumber: Permendagri Nomor 17 tahun 2016)

Inisiasi adalah tahap pertama dalam suatu proses inovasi.. Agar hasil litbang dapat diketahui dan dimanfaatkan secara luas, maka litbang perlu menyampaikan produk litbang secara proaktif melalui seminar/*workshop/roadshow* kepada perangkat daerah dan/atau pengguna lainnya. inisiasi dipahami sebagai proses yang menghasilkan laporan akhir penelitian.

Internalisasi merupakan tahap kedua dari proses inovasi, dimana tahap awal penelitian dan *pengembangan* sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah. Fase ini merupakan fase yang sangat penting, pada fase internalisasi berlangsung proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari penanggung jawab inisiasi yaitu lembaga penelitian dan pengembangan kepada penanggung jawab internal yaitu pihak yang bertanggung jawab. lembaga pelaksana (perangkat daerah). Peralihan dari tahap inisiasi ke tahap penyisipan setidaknya melibatkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: adopsi, adaptasi dan replikasi.

Pada awal internalisasi, peran lembaga litbang sangat besar. Dengan semakin intensnya interaksi antara *lembaga* litbang dengan pemangku kepentingan, dimana pemahaman dan penerapan keluaran litbang oleh para pemangku kepentingan meningkat, maka peran lembaga litbang pada saat itu semakin berkurang.

Institusionalisasi adalah tahap ketiga dari proses inovasi. Lembaga penelitian

dan pengembangan tidak lagi terlibat dalam proses ini. Penyelenggaraan dan pelembagaan kegiatan penelitian dan pengembangan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah masing-masing. Lembaga litbang hanya memantau dan/atau mengkaji fungsi hasil litbang yang dilembagakan.

Keberlanjutan adalah tahap akhir dari proses inovasi yang bertujuan untuk melanjutkan produksi penelitian dan pengembangan agar lebih bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

e. Pola Kerjasama dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Kota Bandung.

Dalam melaksanakan kegiatan, Litbang Kota Bandung perlu membangun jejaring kerjasama IPTEK yang berfungsi membentuk jalinana hubungan interaktif dengan memadukan unsur-unsur kelembagaan Pengembangan jejaring kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional dilakukan dalam rangka penguasaan Iptek (*scientific recognition*) dan peningkatan peran litbang dalam pembangunan. Jejaring kerjasama IPTEK diperlukan guna menyiasati keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan pembiayaan.

Unsur-unsur jaringan IPTEK yang dapat diajak kerjasama, adalah:

- Badan litbang lain milik pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat);
- Badan litbang non pemerintah dalam dan luar negeri (CIFOR);
- Perguruan tinggi di dalam maupun di Luar Negeri; dan
- Swasta/industri

Strategi peningkatan kerjasama yang dapat dilakukan litbang Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan dan menggali sumber-sumber kerjasama baik dalam maupun luar negeri;
- Peningkatan kerjasama melalui sistem *cost sharing*;
- Menjalin *sharing* pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan pemahaman SDM Litbang;
- Kerjasama *data sharing*; yaitu kerjasama pemanfaatan dan memonitor pergerakan arus data dan informasi guna diakses sebagai informasi dasar kelitbang;
- peningkatan penelitian kolaboratif dalam rangka meningkatkan kapasitas litbang; penjangkaran mitra kerjasama melalui usaha komersialisasi berbasis *joint research*;
- peningkatan pengelolaan/manajemen kerjasama penelitian.

KESIMPULAN

Kondisi persaingan global, regional, nasional maupun lokal, menuntut pemerintah meningkatkan kemajuan pembangunan serta inovasi melalui kegiatan litbang. Litbang diharapkan mampu bersaing dengan mengandalkan keunggulan kompetitif, menghasilkan produk inovatif dengan kualitas tinggi, tepat guna, yang di dasarkan pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta bermanfaat bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pemecahan masalah social dan ekonomi. Dengan dibentuknya litbang diharapkan mampu menumbuhkan kemajuan IPTEK, bertanggung jawab mencari berbagai invensi serta menggali potensi pendayagunaannya di daerah.

Mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan selama

ini, bahwa dari hasil-hasil kelitbang yang dilaksanakan Kota Bandung di akui masih belum dilaksanakan secara optimal untuk menjawab berbagai macam dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan Kota Bandung

- Tidak didukung oleh sumberdaya (SDM, dana, dan fasilitas) penelitian dan pengembangan yang memadai.
- Rendahnya komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan (perangkat daerah) untuk memanfaatkan hasil litbang.
- Hasil kegiatan litbang belum mencerminkan kebutuhan solusi atas permasalahan yang dihadapi perangkat daerah secara proporsional
- Peran dan fungsi litbang belum menjadi mitra kerja utama perangkat daerah.
- Aspek pengorganisasian belum terbentuk secara legal formal
- Pengendalian mutu pada manajemen riset litbang belum optimal dan belum berwujud rangkaian kegiatan ilmiah yang berkesinambungan dan berkelanjutan
- Belum optimalnya jejaring kerjasama litbang

Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, membutuhkan peran dan fungsi Litbang untuk memberikan dukungan kepada perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan program dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan. Strategi yang dapat diterapkan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan litbang Kota Bandung, sebagai berikut:

- Strategi penguatan Badan Litbang difokuskan pada upaya-upaya perluasan cakupan substansi dan kualitas penelitian,
- Pemantapan fasilitasi serta penguatan infrastruktur kelembagaan dan sarana prasarana
- Penyediaan dan distribusi SDM aparatur/personil litbang (peneliti, perekayasa, tim penunjang) yang tepat kompetensi dan jumlah pengalokasian anggaran kelitbang.
- Merumuskan kembali manajemen riset dengan memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM, anggaran, dan sumber daya lainnya
- Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan).

Dengan menerapkan strategi tersebut di atas, kita berharap dapat berhasil meningkatkan kegiatan litbang, yang diwujudkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia litbang yang berkualitas, harmonisasi metode operasional kegiatan litbang, peningkatan proporsi hasil riset, dan peningkatan hasil riset. pemanfaatan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pengembangan berhasil menghasilkan inovasi yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan dan mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Lembaga penelitian dan pengembangan struktur pemerintahan Kota Bandung diharapkan dapat berperan strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Semakin besar kapasitas penelitian dan pengembangan Kota Bandung, maka semakin besar pula peluang terciptanya konsep, model, dan pilihan kebijakan yang akurat, yang menjadi dasar penentuan arah dan strategi yang tepat untuk mendorong keberhasilan Pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah mempunyai dampak besar terhadap keberhasilan pembangunan negara. Oleh karena itu, pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan Langkah strategis dalam pengembangan kebijakan daerah berbasis penelitian agar dapat berperan efektif dan efisien dalam meningkatkan kegiatan perekonomian kegiatan pembangunan Kota Bandung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Padjadjaran dan Bappelitbang Kota Bandung yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan riset ini.

REFERENSI

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka. Cipta. Jakarta.
- Cohen, W.M. and D.A. Levinthal. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective On Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly* 35:128 –152
- Dahlander, L and D. M. Gann. (2010). How Open Is Innovation? *Research Policy* 39:699 –709
- Freeman, C. And L. Soete. (2009). Developing Science, Technology And Innovation Indicators: What We Can Learn From The Past. *Research Policy* 38:583 –589
- Hasibuan, Malayu, S.P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Kementerian Riset dan Teknologi. (2010). *Indikator ekonomi berbasis pengetahuan Indonesia*. Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta
- Kersanah. (1993). Iklim Kerja yang Kondusif di Organisasi Litbang. *Warta Pengelolaan Litbang, Perkembangan Iptek*, Volume 4 No. 11/1993: 23-28
- Lakitan, B. (2010). *Revitalisasi Kelembagaan Riset Dan Pengembangan Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional*. Seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang, Universitas Sahid, Jakarta 23 November 2010
- (2011). *Indikator Kinerja Lembaga Litbang di Era Informasi Terbuka*, Kementerian Riset dan Teknologi, Makalah pengarahan pada Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama RI di Makassar tanggal 12 - 15 April 2011
- Putera, Prakoso Bhairawa, dkk. (2013). Struktur Baru Organisasi Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Di Indonesia: Sebuah Konsep dan Respon atas Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi 1 dalam Reformasi Birokrasi, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 9, Nomor 3 Tahun 2013 hal 299-317
- Surminah, Lin. (2012). *Manajemen Aset di Lembaga Litbang*, *Warta Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang*, Jakarta: Penerbit Papiptek-LIPI, 2008:77-94.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung